

	News Title : Konsultasi Publik Rancangan Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka	
	Media Name : niaga.asia	Journalist : -
	Publish Date : 29 June 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Farid Amir (Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ditjen Daglu Kemendag), Olvy Andrianita (Sekretaris Bappebti), Juan Permata Adoe (Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Beranda	Topic : Ekspor CPO

Konsultasi Publik Rancangan Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka

© 29 Juni 2023



RBD Palm Olein penyumbat aliran turbin dari ekspor CPO dan kini dalam proses dilayang di ekspor. (Foto Minimax)

JAKARTA, MICA.ASIA – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Publik Kebijakan Ekspor Minyak Kelapa Sawit (Crude Palm Oil/CPO) Melalui Bursa Berjangka di Indonesia yang diselenggarakan di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (26/6).

Acara dipimpin Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita mewakili Pih Kepala Bappebti dan dihadiri para pemangku kepentingan sektor kelapa sawit, di antaranya pelaku usaha, asosiasi, dan juga perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut konsultasi publik yang dipimpin Menteri Perdagangan pada 5 Juni 2023 lalu. Banyak masukan dan perhatian yang disampaikan pelaku usaha dalam kegiatan tersebut, sehingga kami kembali mengadakan konsultasi publik lanjutan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait rancangan kebijakan yang sedang disusun," jelas Pih Kepala Bappebti Iy Kamin di tempat tersebut.

Iy Kamin menjelaskan, ekspor CPO melalui bursa berjangka diharapkan dapat menciptakan bank data CPO yang akurat dan terintegrasi dengan amanah Undang-undang Nomor 10/1997 sebagaimana diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang menegaskan bahwa salah satu tujuan PBK adalah sebagai sarana penciptaan harga (price discovery) dan pembentukan harga acuan (price reference) yang transparan.

"Hal tersebut sebagaimana diragukan pula oleh Menteri Perdagangan Zulfikri Hasan dalam arahnya pada Rapat Kerja Bappebti dan Kementerian Perdagangan Tahun 2023. Artinya, bursa CPO yang dituntut pemerintah harus terpercaya, baik di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, juga harus mampu memberikan layanan yang optimal kepada pelaku usaha," katanya.



Pertumbuhan sawit masih menjadi penggerak utama pertumbuhan lapangan usaha pertanian setelah perikanan. (Foto Desk Niaga.Asia)

Biaya transaksi CPO di bursa juga harus kompetitif atau minimal sama dengan biaya transaksi CPO yang dilakukan selama ini oleh pelaku usaha Indonesia di bursa Malaysia. Diharapkan, kebijakan yang akan dijalankan dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan kontrak jangka panjang (long term contract) dan mudah dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, diperlukan pelatihan dan sosialisasi terkait tata cara serta mekanisme ekspor melalui bursa berjangka kepada pelaku usaha. Dalam kegiatan konsultasi ini juga dilakukan sesi pemaparan yang dimoderatori Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe.

Sesi ini menampilkan paparan konsep Rancangan Peraturan Bappebti tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik untuk Ekspor CPO di Bursa Berjangka dan paparan konsep Peraturan Tata Tertib (PTT) Bursa oleh Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita, serta paparan konsep Rancangan Pemerting dan Bisnis Proses Ekspor CPO melalui Bursa Berjangka oleh Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) Farid Amir.

Dalam paparannya, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ditjen Daglu Farid Amir menerangkan, ekspor melalui bursa berjangka komoditi hanya akan mengatur CPO dengan HS 15111000 dan tidak termasuk produk turunannya.

Hal ini dipilih karena CPO tersebut volumenya tidak terlalu besar sehingga saat implementasi tidak menimbulkan guncangan yang terlalu besar pula.

"Selain itu, pihak-pihak yang berhak melakukan ekspor adalah Eksporir Terdaftar (ET) dan memiliki Hak Ekspor (HE) yang diperoleh dari pemenuhan atas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dari/atau dari pihak yang mengalihkan HE atas pemenuhan DMO," jelas Farid.

Farid juga menjelaskan, alur bisnis proses dari kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka tidak ada perubahan yang signifikan. Pada kebijakan ini ada penambahan satu proses sebelum ekspor, yaitu melakukan ekspor CPO, yaitu harus dilaksanakan di bursa berjangka untuk kemudian diterbitkan bukti pembelian CPO oleh bursa.

"Bukti pembelian ini adalah dokumen yang akan digunakan dalam pemrosesan Persetujuan Ekspor (PE)," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menjelaskan Rancangan Peraturan Bappebti dan Rancangan Peraturan dan Tata Tertib Bursa. Menurutnya, Rancangan Peraturan Bappebti tentang Petunjuk Teknis Perdagangan Pasar Fisik untuk Ekspor CPO yang mengatur, antara lain tata kelola bursa CPO dan lembaga kliring CPO, pernyataan penjamin bursa CPO dan lembaga kliring CPO, tata cara perdagangan di bursa CPO, mekanisme pengawasan oleh Bappebti dan bursa CPO, mekanisme penyelesaian perselisihan dan force majeure.

Sementara Peraturan Tata Tertib (PTT) ekspor CPO melalui bursa berjangka berisi ketentuan lebih teknis yang mencakup persyaratan dan tata cara penerimaan peserta penjual/peserta pembeli, hak dan kewajiban peserta penjual/peserta pembeli, biaya pemrosesan transaksi, mekanisme pengawasan transaksi ekspor CPO, yang harus dilaksanakan di bursa berjangka untuk kemudian diterbitkan bukti pembelian CPO oleh bursa.

"Bukti pembelian ini adalah dokumen yang akan digunakan dalam pemrosesan Persetujuan Ekspor (PE)," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menjelaskan Rancangan Peraturan Bappebti dan Rancangan Peraturan dan Tata Tertib Bursa. Menurutnya, Rancangan Peraturan Bappebti tentang Petunjuk Teknis Perdagangan Pasar Fisik untuk Ekspor CPO yang mengatur, antara lain tata kelola bursa CPO dan lembaga kliring CPO, pernyataan penjamin bursa CPO dan lembaga kliring CPO, tata cara perdagangan di bursa CPO, mekanisme pengawasan oleh Bappebti dan bursa CPO, mekanisme penyelesaian perselisihan dan force majeure.

Sementara Peraturan Tata Tertib (PTT) ekspor CPO melalui bursa berjangka berisi ketentuan lebih teknis yang mencakup persyaratan dan tata cara penerimaan peserta penjual/peserta pembeli, hak dan kewajiban peserta penjual/peserta pembeli, biaya pemrosesan transaksi, mekanisme pengawasan transaksi ekspor CPO, yang harus dilaksanakan di bursa berjangka untuk kemudian diterbitkan bukti pembelian CPO oleh bursa.